



**Pengaruh Tingkat Kemandirian, Kesejahteraan Masyarakat dan Kekayaan
Pemerintah Daerah Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Pada Website
Resmi Pemerintah Daerah
(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah di Pulau Kalimantan Tahun 2019-2020)**

Aliffia Nur Indaryani ¹⁾ ; Sri Rahayu ²⁾

¹⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University

Email: ¹⁾ aliffianurindaryani@gmail.com ; ²⁾ sriahayu@telkomuniversity.ac.id

How to Cite :

Indaryani, A. N., & Rahayu, S. (2023). Pengaruh Tingkat Kemandirian, Kesejahteraan Masyarakat dan Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Pada Website Resmi Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Di Pulau Kalimantan Tahun 2019-2020). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1). doi: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>

ARTICLE HISTORY

Received [16 Agustus 2022]

Revised [28 Desember 2022]

Accepted [02 Januari 2023]

KEYWORDS

Level of Independence,
Community Welfare, Regional
Wealth, Disclosure of Financial
Information

**This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license**



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak tingkat kemandirian, kesejahteraan masyarakat dan kekayaan pemerintah daerah terhadap pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif dengan sampel Pemerintah Daerah di Pulau Kalimantan pada tahun 2019-2020, menggunakan model regresi logistik dengan bantuan dari software SPSS Versi 23. Hasil yang diperoleh pada penelitian bahwa tingkat kemandirian, kesejahteraan masyarakat dan kekayaan daerah secara simultan berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah. Sedangkan secara parsial tingkat kemandirian, kesejahteraan masyarakat dan kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah.

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of the level of independence, community welfare and regional wealth on the disclosure of financial information on the official website of the local government. The data used in this study are secondary data. This research uses quantitative methods. The sampling technique in this study used saturated samples this study is the Regional Government on the island of Kalimantan in 2019-2020. The data analysis model used by this study is logical regression analysis using SPSS Version 23 software. The results showed that the level of independence, community welfare and regional wealth simultaneously had a significant impact on the positive direction of the disclosure of financial information on the official website of the local government. Meanwhile, partially the level of independence, community welfare and regional wealth has a significant positive effect on the disclosure of financial information on the official website of the local government

PENDAHULUAN

Pengungkapan laporan keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi laporan keuangan pemerintah daerah dan sebagai salah satu bentuk komitmen yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yaitu dengan mengungkapkan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah (Liza & Arza, 2019). Bentuk transparansi yang dapat dilakukan pemerintah daerah dengan cara mengungkapkan laporan keuangan melalui media yang dapat diakses dengan oleh masyarakat (Trisnawati & Komarudin, 2018). Pentingnya mengungkapkan laporan keuangan melalui laman resmi pemerintah daerah selain sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia dalam memperoleh keterbukaan informasi, dengan menggunakan laman resmi pemerintah daerah maka publikasi laporan keuangan dapat menghemat biaya dan cepat sehingga informasi mengenai keuangan pemerintah daerah mudah diakses oleh masyarakat (Yustikasari, 2018).

Adapun masalah yang terjadi mengenai pengungkapan informasi keuangan pada website resmi Pemerintah Daerah yaitu dari 56 pemerintah daerah pada tahun 2018 hanya 22 pemerintah daerah yang melakukan pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah dan sebanyak 34 pemerintah daerah tidak melakukan pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah dan banyaknya pemerintah daerah yang tidak melakukan pengungkapan informasi keuangan melalui website resmi pemerintah daerah. Dan pada tahun 2019 jumlah pemerintah daerah yang melakukan pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah berjumlah 24 pemerintah daerah dan sisanya 32 pemerintah daerah tidak melakukan pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah, dimana hal ini tidak sejalan dengan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 yang menginstruksikan kepada pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah. Berdasarkan permasalahan yang ditemui dari 56 Pemerintah Daerah masih banyak pemerintah daerah yang tidak mengungkapkan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah.

Faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah adalah tingkat kemandirian, kesejahteraan masyarakat dan kekayaan daerah. Faktor pertama yang mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah adalah tingkat kemandirian. Tingkat kemandirian merupakan ukuran yang menunjukkan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya, pembangunan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Rozi, 2018). Tingkat kemandirian yang tinggi daerah cenderung akan lebih terbuka untuk mengungkapkan informasi mengenai keuangan kepada masyarakat agar masyarakat dapat percaya terhadap kinerja pemerintah daerah dan mengetahui kinerja pemerintah daerah (Utami & Sulardi, 2020).

Faktor yang kedua yang mempengaruhi yaitu kesejahteraan masyarakat. Menurut (Bustamam et al., 2021) kesejahteraan masyarakat merupakan kegiatan yang terencana untuk memenuhi kebutuhan dasar dan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kesejahteraan masyarakat dicerminkan oleh pendapatan per kapita, tingginya pendapatan per kapita yang daerah dapatkan maka semakin tinggi pula tingkat monitoring yang dilakukan masyarakat untuk pengungkapan informasi pada pemerintah daerah (Yustikasari, 2018). Apabila tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah baik, maka pola pikir dari masyarakatnya lebih maju dan semakin tinggi pula tingkat pengawasan politik yang dilakukan oleh masyarakat kepada masyarakat (Saraswati et al., 2019).

Faktor ketiga yang mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah adalah kekayaan daerah. Menurut (Anugrah Hadi & Angelina Setiawan, 2020) kekayaan daerah diasumsikan sebagai seberapa besar kinerja pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatannya baik pendapatan sah maupun pendapatan asli daerah. Semakin tinggi kekayaan daerah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat semakin ketat, sehingga karena ditakutkan terjadi penyelewengan dana yang dilakukan oleh pemerintah (Rozi, 2018), sehingga hal

ini memotivasi dalam mengungkapkan informasi mengenai keuangan berupa laporan keuangan pada laman resmi pemerintah daerah (Anugrah Hadi & Angelina Setiawan, 2020).

LANDASAN TEORI

Signalling Theory

Teori signailling sendiri menjelaskan hubungan mengenai akuntansi sebagai cara pemberian sinyal oleh perusahaan kepada investor, dimana laporan akuntansi sering digunakan sebagai sinyal informasi kepada investor menurut (goodfrey, 2009) dalam (Liza & Arza, 2019). Pemerintah dalam teori signailling berusaha memberikan sinyal yang baik kepada rakyat, tujuannya agar rakyat terus mendukung pemerintah sehingga pemerintah mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik dan laporan keuangan dijadikan sarana untuk memberikan sinyal kepada rakyat (Evans dan Patton, 1987) dalam (Prima & Verawaty, 2018).. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan sinyal positif kepada masyarakat mengenai informasi keuangan yang positif, internet merupakan media yang efektif untuk menunjukkan sinyal positif kepada masyarakat (Ningsih, 2018) .

Pengungkapan Informasi Keuangan

Menurut (Jessica & Suhartono, 2020) Pengungkapan informasi keuangan merupakan langkah terakhir di dalam proses akuntansi dalam menyajikan informasi berupa statement keuangan, dimana pengungkapan informasi keuangan merupakan salah satu wujud transparansi pemerintah daerah. Peningkatan transparansi pada publik dapat dilihat dari aksesibilitas dari informasi yang diperoleh oleh masyarakat, informasi keuangan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui website resmi pemerintah daerah disebut dengan e-government (Prima & Verawaty, 2018) . E-government merupakan penggunaan teknologi informasi yang meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak lainnya, perkembangan teknologi telah mempengaruhi perkembangan perekonomian ditandai dengan adanya digitalisasi informasi melalui media komunikasi dan pemanfaatan teknologi (Anggara & Cheisviyanny, 2020).

Tingkat Kemandirian

Menurut (Rozi, 2018) Tingkat kemandirian merupakan ukuran yang menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah untuk mengatur kegiatan pemerintahannya, pembangunan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian ditujukan pada besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang bersumber dari sumber lainnya. Tingginya tingkat kemandirian yang dimiliki daerah maka daerah cenderung akan lebih terbuka dalam mengungkapkan informasi kepada publik, pengungkapan kepada publik ditujukan agar publik mengetahui dan percaya kepada pemerintah bahwa pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik (Utami & Sulardi, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian (Rozi, 2018) dimana menurut penelitian tersebut bahwa tingkat kemandirian berpengaruh terhadap pengungkapan laporan informasi mengenai keuangan pada laman resmi pemerintah daerah Berikut rumus dalam menentukan kekayaan daerah :

$$\text{Tingkat kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

Kesejahteraan Masyarakat

Menurut (Bustamam et al., 2021) kesejahteraan masyarakat merupakan kegiatan yang terencana guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan pendapatan perkapita. Apabila tingkat pendapatan disuatu daerah produkti maka pendapatan perkapita yang didapat masyarakat juga akan tinggi (Nainggolan & Purwanti, 2018).. Apabila tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah baik maka pola pikir dari masyarakat lebih maju dan semakin tinggi pula pengawasan politik yang dilakukan masyarakat semakin tinggi

(Bustamam et al., 2021). Semakin tinggi pendapatan perkapita maka semakin tinggi pula keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan, hal ini memotivasi pemerintah untuk mempublikasikan informasi keuangan melalui website resmi pemerintah daerah untuk mengurangi asimetri informasi dalam masyarakat (Bustamam et al., 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurhidayati & Rahayu, 2020), menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah pada website resmi pemerintah daerah. Berikut rumus dalam menentukan kesejahteraan masyarakat:

$$\text{Kesejahteraan Masyarakat} = \text{Ln PDRB perkapita}$$

Kekayaan Daerah

Menurut (Nurhidayati & Rahayu, 2020), kekayaan daerah merupakan suatu kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengolah sumber daya yang dimiliki berkaitan dengan pendapatan yang sudah ditentukan oleh peraturan pemerintah yang berasal dari daerah tersebut. Kekayaan pemerintah daerah diukur dengan proksi total pendapatan asli daerah (Hardiningsih et al., 2021). Sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak dan retribusi yang berasal dari pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat, apabila pendapatan asli daerah yang didapat oleh pemerintah daerah tinggi maka partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi juga tinggi sehingga pemerintah terdorong melakukan pengungkapan secara lengkap pada laporan (Yulianti & Gamayuni, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yulianti & Gamayuni, 2018) menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah

$$\text{Kekayaan Daerah} = \text{Ln PAD}$$

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan tahun 2019-2020 dengan menggunakan teknik sampel jenuh dimana pada teknik ini jumlah keseluruhan populasi merupakan bagian dari sampel yaitu sebanyak 56 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan Tahun 2019-2020. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik karena variabel dependen menggunakan variabel dummy dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Ln} \frac{p}{1-p} = \beta_0 + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + e$$

Keterangan:

$\text{Ln} \frac{p}{1-p}$: Pengungkapan informasi keuangan pada <i>website</i> resmi pemerintah daerah
$\text{Ln} \frac{p}{1-p} = 1$: Pemerintah daerah mengungkapkan informasi keuangan pada <i>website</i> resmi pemerintah daerah
$\text{Ln} \frac{p}{1-p} = 0$: Pemerintah daerah tidak mengungkapkan informasi keuangan pada <i>website</i> resmi pemerintah daerah
X1	: Tingkat Kemandirian
X2	: Kesejahteraan Masyarakat
X3	: Kekayaan Daerah
e	: Error / kesalahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Statistika Deskriptif

Sampel penelitian ini sebanyak 56 pemerintah daerah di Pulau Kalimantan Tahun 2019-2020, jumlah data yang dihasilkan sebanyak 112 data. Berikut adalah hasil pengujian statistik deskriptif dari variabel tingkat kemandirian daerah, kesejahteraan masyarakat, kekayaan daerah dan pengungkapan informasi keuangan.

Tabel 1. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Kemandirian daerah	112	0,01	0,31	0,0944	0,05352
Kesejahteraan Masyarakat	112	16,87	19,72	17,9247	0,65725
Kekayaan Daerah	112	23,20	27,36	25,4834	0,76001
Pengungkapan Informasi Keuangan	112	0	1	0,44	0,498
Valid N (listwise)	112				

Sumber: Data di olah Penulis 2022

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa ketiga variabel yaitu variabel tingkat kemandirian, kesejahteraan masyarakat dan kekayaan daerah memiliki nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi, sehingga hal ini menunjukkan bahwa data bersifat homogen atau data memiliki penyimpangan relatif kecil. Namun hal ini berbeda dengan hasil nilai mean pada variabel pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah nilai mean lebih kecil dari nilai standar deviasi hal ini menunjukkan data tersebut memiliki penyimpangan relatif kecil

Pengujian Kelayakan Model Regresi Logistik

Tabel 2. Hosmer and Lemshow Tets

Step	Chi-Square	df	sig
	12,180	8	0,143

Sumber : Hasil Pengolahan Data Software SPSS Ver 23

Berdasarkan hasil uji kelayakan regresi logistik menggunakan bantuan aplikasi SPSS 23, diperoleh nilai signifikansi 0.143 lebih besar dari 0.05 sehingga H_0 diterima. Dengan demikian, model tersebut telah mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dengan kata lain model diterima karena sesuai dengan data observasinya.

Hasil Uji Overall Model Fit Test

Tabel 3. Hasil Uji Common Effect Model

-2LogL Awal(block number=0)	153,510
-2LogL Akhir(block number=1)	115,342

Sumber : Hasil Pengolahan Data Software SPSS Ver 23

Berdasarkan hasil uji *Common Effect Model* menggunakan software SPSS versi 23 diperoleh nilai -2LogL pada langkah awal (block number = 0) sebesar 153.510. sementara nilai -2LogL pada langkah akhir (block number = 1) sebesar 115.342. Hal ini menunjukkan penurunan -2LogL pada

langkah awal ke -2LogL pada langkah akhir yaitu sebesar 38.168. Dari hasil tersebut terlihat adanya penurunan -2LogL ke -2LogL dengan nilai 38.168. Dari hasil tersebut terlihat bahwa hasil uji yang semajun baik sehingga hasil uji ini dapat digunakan.

Pengujian Simultan (Omnibus Test of Model Coefficient)

Tabel 4. Hasil Uji *Omnibus Test of Model Coefficient*

		Chi-Square	DF	Sig
Step 1	Step	38,168	3	0,000
	Block	38,168	3	0,000
	Model	38,168	3	0,000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Software SPSS Ver 23

Hasil *Omnibus Test of Model Coefficients* menggunakan bantuan *software* SPSS versi 23. Berdasarkan tabel di atas, dinyatakan bahwa nilai *Chi-Square* sebesar 38.168 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Dengan demikian, H_a diterima yang artinya variabel tingkat kemandirian daerah, kesejahteraan masyarakat dan kekayaan daerah berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah di Pulau Kalimantan tahun 2019-2020.

Koefisien Determinasi

Tabel 5. Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	115,342	0,289	0,387

Sumber : Hasil Pengolahan Data Software SPSS Ver 23

Hasil pengujian koefisien determinasi menggunakan bantuan *software* SPSS versi 23. Berdasarkan tabel di atas, dinyatakan bahwa nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0.387. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat kemandirian daerah, kesejahteraan masyarakat dan kekayaan daerah mampu menjelaskan variabel pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah di Pulau Kalimantan tahun 2019-2020 sebesar 0.387 atau 38.7%, sedangkan sisanya sebesar 61.3% dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian ini.

Uji Signifikan Parsial

Pengujian secara parsial melalui *variabel in the equation* dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 6. Variabel in the Equation

	B	S.E	Wald	Df	Sig	Exp (b)	95% C.I. For EXP (B)	
							Lower	Upper
X1	13,237	4,743	7,788	1	0,005	560614,444	51,441	6109652957,379
X2	1,245	0,440	8,014	1	0,005	3,474	1,467	8,226
X3	1,223	0,350	12,212	1	0,000	3,396	1,711	6,743
Constant	-54,997	11,119	24,446	1	0,000	0,000		

Sumber : Hasil Pengolahan Data Software SPSS Ver 23

Tabel 6 menyatakan hasil pengujian secara parsial menggunakan bantuan *software* SPSS versi 23. Berdasarkan tabel di atas, dinyatakan:

- a. Nilai signifikansi variabel tingkat kemandirian daerah sebesar 0.005, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian, H_a diterima sehingga dinyatakan bahwa tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah di Pulau Kalimantan tahun 2019-2020.
- b. Nilai signifikansi variabel kesejahteraan masyarakat sebesar 0.005, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian, H_a diterima sehingga dinyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah di Pulau Kalimantan tahun 2019-2020.
- c. Nilai signifikansi variabel kekayaan daerah sebesar 0.000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian, H_a diterima sehingga dinyatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah di Pulau Kalimantan tahun 2019-2020.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat kemandirian, kesejahteraan masyarakat dan kekayaan daerah terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah di Pulau Kalimantan tahun 2019-2020. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 56 daerah di Pulau Kalimantan dengan periode penelitian tahun 2019-2020. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Secara simultan variabel tingkat kemandirian daerah, kesejahteraan masyarakat dan kekayaan daerah berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah di Pulau Kalimantan tahun 2019-2020.
2. Secara parsial, pengaruh masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut:
 - a. Tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah di Pulau Kalimantan tahun 2019-2020.
 - b. Kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah di Pulau Kalimantan tahun 2019-2020.
 - c. Hasil uji dari Kekayaan daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *situs resmi* pemerintah daerah di Pulau Kalimantan tahun 2019-2020.

Saran

Dengan adanya penelitian ini, peneliti menjadi bertambah ilmu pengetahuan serta wawasannya mengenai pengungkapan informasi keuangan yang ada pada *website* pemerintah daerah. Kedepannya, diharapkan peneliti lebih menguasai materi pengungkapan informasi keuangan serta menjadi lebih berminat untuk ikut mengkaji terhadap keterbukaan informasi keuangan yang dilakukan pemerintah daerah

Bagi pemerintah diharapkan pemerintah daerah bisa lebih peduli serta memperhatikan pengungkapan informasi keuangan yang disajikan dalam situs resmi masing-masing Pemerintah Provinsi di Indonesia. Sikap dan perhatian tersebut menjadi sangat penting guna menciptakan transparansi yang baik, akuntabilitas yang baik, serta mampu mengurangi asimetri informasi yang terjadi. Sehingga akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pihak pengelola keuangan yang dilakukan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, E., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2162–2184.
- Anugrah Hadi, D., & Angelina Setiawan, M. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengungkapan Internet Budgeting Reporting. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2099–2114.
- Bustamam, N., Yulyanti, S., & Dewi, K. S. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Pekanbaru. *75 Ekonomi KIAT*, 32(1), 85–92.
- Jessica, N., & Suhartono, S. (2020). Pengaruh Intergovernmental Revenue, Indeks Pembangunan Manusia, Kekayaan Daerah, Dan Opini Audit Terhadap 76 Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris : Pemerintah Daerah Di Pulau Sumatera Tahun 2018). *Akuntansi Keuangan*, 9(021), 14–27.
- Hardiningsih, P., Srimindarti, C., Jannah, A., & Yosaphat, M. (2021). Digitalisasi Publikasi Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Vol. 19(No. 1), 138–152.
- Liza, W. J., & Arza, F. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 959–976.
- Masra, E. A., & Sari, V. F. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting (Ifrr) Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2757–2771.
- Nainggolan, A. T., & Purwanti, D. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah via Website. *Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung*, 2012, 1–26.
- Ningsih, R. F. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun 2015). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(2), 1–19.
- Nurhidayati, R. P., & Rahayu, S. (2020). *Determinant Disclosure of Lkpd in the Official Website of the Provincial*. 3(2), 87–95.
- Prima, W., & Verawaty. (2018). Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting melalui E-Government di Sumatera Bagian Selatan. *Seminar Nasional Global Competitive Advantage*, 2(2), 40–51.
- Rozi, F. (2018). Determinan Pengungkapan Informasi Keuangan Dalam Website Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi). *Jurnal Akuntansi*, 6(10), 352.
- Saraswati, T., Budiarti, L., & Sudibyo, Y. A. (2019). Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet dan Faktor yang Memengaruhinya. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(1), 85–101.
- Trisnawati, M. D., & Komarudin, A. (2018). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *JDAB*. 80 Utami, S. R., & Sulardi, S. (2020). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit, Dan Rasio Kemandirian Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 253.
- Utami, S. R., & Sulardi, S. (2020). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Rasio Kemandirian terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 19(2), 253.
- Yulianti, F., & Gamayuni, R. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). In *Prosiding Penelitian*
- Yustikasari, Y. (2018a). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Kompleksitas Pemerintahan, dan Tingkat Kesejahteraan Daerah Terhadap Tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada website pemerintah da.pdf. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 11(1), 28–44.